



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARWAN USMAN.SP.MSI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 519466

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.470.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4317 m²/4317 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 791 m²/791 m² di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 4360 m²/4360 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1100 m²/24674 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m²/15 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m²/15 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 367.500.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 TD (REVO) Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000



4. MOBIL, HONDA MOBOLIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI		
Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.845.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.845.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.